

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) merupakan kawasan konservasi dan cagar biosfer yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan nomor 285/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus tahun 2000 tentang penunjukkan kawasan TNBD seluas 60.500 ha yang terletak di tiga kabupaten di Provinsi Jambi yaitu, Kabupaten Sarolangun (6.758 ha), Kabupaten Batanghari (41.259 ha), dan Kabupaten Tebo (12.483 ha). Akan tetapi, ratusan tahun sebelum TNBD ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan cagar biosfer, telah ada komunitas adat yang mendiami daerah ini yaitu Orang Rimba. Oleh sebab itu, penetapan TNBD juga menjadi legalitas bagi Orang Rimba berada di dalamnya. Alasan kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional sebagai berikut:

1. Habitat berbagai satwa liar dilindungi yang semakin terdesak habitatnya.
2. Dihuni sekitar 900 jiwa Orang Rimba yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya hutan.
3. Topografi pegunungan Bukit Duabelas agak curam dengan kelerengan 0-20% dan jenis tanah podsolik yang sangat peka terhadap erosi. Pegunungan Bukit Duabelas juga merupakan hulu-hulu sungai yang termasuk dalam sub DAS Batang Tembesi dan Batang Tabir yang bermuara di DAS Batanghari. Sehingga untuk kepentingan tata air perlu dipertahankan.
4. Kehidupan masyarakat Orang Rimba dan kekayaan keanekaragaman hayati merupakan potensi yang bagus bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kebudayaan (<https://tnbukitduabelas.id/profile/sejarah-kawasan>).

Namun, pada tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan hasil tata batas ulang yang dilakukan balai TNBD, ada pengurangan luas TNBD yang semula ditetapkan 60.500 ha melalui SK Menteri Kehutanan nomor 285/Kpts-II/2000 sebagai kawasan konservasi kini menjadi 54.780 ha. Berkurangnya kawasan konservasi TNBD akibat kegiatan ilegal yang dilakukan perusahaan dan masyarakat sekitar dengan banyaknya alih fungsi kawasan konservasi menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet. Dominasi kapitalis yang didukung oleh corak demokrasi liberal, telah memunculkan yang disebut oleh Habermas sebagai kolonisasi. Kolonisasi itu terjadi manakala sistem pengendalian, yaitu uang (kapitalis) dan kekuasaan

(negara) mendominasi sistem integrasi sosial dan budaya yang disebutnya dunia kehidupan (*life word*).

Hutan TNBD yang mulanya sebagai ruang hidup Orang Rimba selama ratusan tahun lamanya dirawat turun temurun oleh leluhur mereka, kini menjadi komoditas pasar. Sumber daya hutan yang selama ini menjadi sumber pangan, sandang, dan papan Orang Rimba semakin menipis. Sementara, Orang Rimba sangat sedikit ketergantungan terhadap benda-benda materi dari luar hutan. Kondisi ini menyebabkan penyempitan ruang hidup mereka. Pemerintah secara tidak langsung melalui kebijakan yang melegalkan perusahaan membuka lahan perkebunan menyebabkan Orang Rimba sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) semakin marginal.

Dengan masuknya investasi perkebunan kelapa sawit dan karet memberikan perubahan yang berdampak tidak baik bagi kehidupan Orang Rimba. Kini Orang Rimba tidak hanya tinggal di dalam TNBD, tapi terpaksa tinggal di jalan lintas, di desa-desa sekitar TNBD, di dalam perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dan masyarakat sekitar. Bahkan banyak diantara kelompok Orang Rimba kita temui berjalan berkilo-kilo sampai ke Provinsi Sumatera Barat untuk mencari kehidupan dalam keadaan miris.

Tercatat pada tahun 2015, sedikitnya 11 Orang Rimba di kawasan TNBD meninggal. Mereka diduga tewas akibat kekurangan pangan dan air bersih. Kemudian studi yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, dengan KKI Warsi tahun 2016, menemukan prevalensi hepatitis B di kalangan Orang Rimba di Jambi mencapai 33,9 persen. Sebanyak empat dari 10 orang anggota komunitas Orang Rimba mengidap penyakit hepatitis B (<http://warsi.or.id/>).

Sejalan dengan itu, hasil studi dari Fuad Muchlis (2017), mengenai “Praktik Komunikasi Dalam Pemberdayaan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi” menyimpulkan bahwa marginalisasi Orang Rimba akibat ekologis dan tergerusnya tatanan sosial-ekonomi-kultural mereka karena struktur sosial yang pro terhadap kapitalis. Kemudian kontestasi pemanfaatan sumber daya hutan antara Orang Rimba versus PT. Wahana Printis dalam satu kasus di bagian timur TNBD, menegaskan bahwa praktek dominasi

suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan dari negara yang berpihak kepada korporasi (kapitalis) untuk mengembangkan usahanya di dalam kawasan hutan dengan mengabaikan hak-hak komunal Orang Rimba masih terjadi sehingga melahirkan konflik diantara keduanya.

Pada bulan Juli 2019, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama tiga minggu di dalam TNBD, memperlihatkan Orang Rimba hidup dalam keadaan yang memprihatinkan. Pemenuhan kebutuhan pangan tidak mengenal gizi seimbang. Umumnya, mereka makan dua kali sehari. Dengan menu makanan yaitu ubi dan nasi yang direbus menjadi satu dalam bentuk bubur. Ubi mereka dapat dari hasil ladang sendiri, sedangkan beras didapat dari bantuan perusahaan PT. Sari Aditya Loka sebanyak 10 kilogram per kepala keluarga dalam sebulan sekali. Biasanya, dalam seminggu Orang Rimba hanya tiga atau empat memakan makanan yang mengandung protein yakni dari babi dan ikan. Babi didapat dari hasil buruan, bagian babi yang dimakan berupa jeroan dan kepala babi, sedangkan badan babi dijual kepengumpul. Sementara itu, ikan didapat Orang Rimba dari sungai disekitar *sudung* (tempat tinggal). Namun, saat ini babi sulit didapat karena hutan TNBD yang semakin menipis dan seluruh Orang Rimba memburunya. Begitupun dengan ikan yang susah jarang ditemui di sungai-sungai akibat musim kemarau.

Pada banyak kasus tersebut, diakibatkan dari kurangnya pengetahuan Orang Rimba terhadap baca, tulis, dan hitung. Oleh karena itu, banyak kalangan yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengatas namakan kepemilikan lahan yang mulanya ditempati Orang Rimba kemudian diklaim sepihak oleh perusahaan atau masyarakat sekitar. Sehingga mereka terusir secara paksa dari lahannya sendiri yang sudah dilegalkan melalui SK Mentri Kehutanan nomor 285/Kpts-II/2000. Pada kasus lain, sebagian juga ada yang menyewekan lahannya untuk dijadikan perkebunan kepada masyarakat desa, namun dengan ketidaktahuannya akan baca, tulis, dan hitung di suruh menandatangani surat yang sebenarnya adalah surat jual-beli tanah. Dilain sisi, sebetulnya pemerintah telah melarang masyarakat sekitar TNBD untuk melakukan transaksi jual-beli maupun transaksi sewa lahan dengan Orang Rimba, namun dengan pengawasan yang belum baik masih banyak persoalan ini terjadi.

Kondisi marginal Orang Rimba dalam banyak bidang kehidupan ini kemudian mengundang berbagai aktor untuk melakukan kegiatan pemberdayaan pendidikan. Dengan tujuan memampukan mereka beradaptasi dan membekali Orang Rimba dengan pengetahuan baca, tulis, dan hitung untuk menghadapi tekanan dari perubahan kondisi kehidupan sosial budaya dan ekonominya saat ini. Mengikuti pemikiran Cawley dalam (Christenson, 1989:11) mengenai definisi pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

A deliberate, democratic, developmental activity; focusing on an existing social and geographical grouping of people; who participate in the solution of common problems for the common good.

Untuk melihat pemberdayaan Orang Rimba, penelitian ini menggunakan perspektif pemberdayaan dari James A. Christenson dan Jerry Robinson (1989:13) dalam bukunya *Community Development in Perspective*, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji pemberdayaan terhadap komunitas sasaran. Pemilihan perspektif tersebut dimaksud agar penelitian ini lebih terarah. Ada empat perspektif pemberdayaan sebagai berikut :

1. *Proses*. Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses secara bertahap dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara sosial-budaya, ekonomi, dan ekologi. Pengembangan kehidupan Orang Rimba ke arah yang lebih baik melalui proses pemberdayaan, dengan tujuan memampukan mereka beradaptasi dengan lingkungannya saat ini agar keadaan komunitas ini menuju *well being*.
2. *Metode*. Jika melihat metode yang digunakan dalam pemberdayaan, maka erat kaitannya dengan cara dan objektivitas. Pengembangan masyarakat adalah sarana untuk mencapai tujuan, melalui metode pemberdayaan yang dilakukan sehingga beberapa tujuan tercapai. Dalam setiap langkah-langkah pemberdayaan Orang Rimba, tentu memiliki tujuan yang akan dicapai dari setiap kegiatan tersebut. Cara dan tujuan yang akan dicapai didasari dari kebutuhan dari Orang Rimba itu sendiri.
3. *Program*. Setiap pemberdayaan selalu memiliki program yang berbeda-beda dengan prosedur yang juga berbeda pula. Metode dinyatakan sebagai

seperangkat prosedur dan program sebagai daftar kegiatan. Misalnya, program pengembangan masyarakat yang berhubungan dengan spesialisasi seperti kesehatan, kesejahteraan, pertanian, industri, rekreasi, dll. Misalnya program pemberdayaan yang ada untuk Orang Rimba mengenai sosialisasi mandi menggunakan sabun mandi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, ini menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan.

4. *Gerakan Sosial*. Pemberdayaan masyarakat akan selalu menghasilkan *social action* dengan berbagai dinamika yang ada pada komunitas sasaran. Dalam setiap program yang dilakukan, pasti ada pro dan kontra terhadap program tersebut. Pengembangan masyarakat sebagai gerakan cenderung dilembagakan dengan membangun struktur organisasinya sendiri, prosedur yang diterima, dan praktisi profesional. Pemberdayaan yang dilakukan berbagai *stakeholder* merupakan suatu tindakan hasil dari berbagai interaksi sosial seperti tanggapan Orang Rimba terhadap program pemberdayaan, baik berupa penolakan atau penerimaan terhadap program-program yang ada.

Sejak tahun 1954 sampai saat ini, pemberdayaan terhadap Orang Rimba telah dilakukan banyak *stakeholders* diantaranya pemerintah, swasta dan LSM untuk ikut serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. *Stakeholders* tersebut antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, PT. Sari Aditya Loka (PT.SAL) 1, akademisi, LSM WALHI, dan LSM Komunitas Konservasi Indonesia WARSI atau KKI Warsi (<http://www.warsi.or.id/>). Adapun jumlah Orang Rimba di TNBD berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik dan LSM KKI Warsi, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Populasi Orang Rimba Berdasarkan Tumenggung (Kepala Kelompok)
di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Tahun 2017

No	Tumenggung	KK	Jiwa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Sebaran
1	Ngadap	123	504	251	253	14
2	Jelitai	106	505	260	245	9
3	Ngrip	93	422	216	206	10
4	Ngangkus	67	292	145	147	4
5	Menyurau	45	179	85	94	1
6	Bepayung	39	145	70	75	2
7	Nyenong	28	89	41	48	2
8	Ngirang	26	110	53	57	2
9	Melayau Tua	22	87	43	44	2
10	Bebayang	21	77	38	39	5
11	Celitai	20	107	55	52	1
12	Ngamal	9	28	13	15	1
Jumlah		599	2.545	1.270	1.275	53

Sumber: Data Base KKI Warsi 2017

Berdasarkan data di atas terlihat ada 2.545 jiwa dengan sebaran lokasi tempat tinggal sebanyak 53 titik di dalam TNBD. Jumlah ini terbilang cukup banyak dengan 12 Tumenggung (Kepala Kelompok) dan masing-masing Tumenggung memiliki beberapa kepala keluarga. Orang Rimba yang masih mendiami TNBD termasuk kelompok yang masih kuat memegang adat istiadat dan memiliki struktur kepemimpinan yang masih komplit, dapat dilihat pada halaman 62. Secara keseluruhan, mereka yang berada di TNBD sudah tersentuh pemberdayaan baik dari pemerintah, LSM, maupun pihak swasta. Mengingat penetapan TNBD juga merupakan usaha Orang Rimba bersama 12 LSM dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menjadikan taman nasional.

Maka penelitian ini mengkaji pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM sebagai Sektor Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat dalam suatu negara. Lahirnya Sektor Ketiga yang dilatarbelakangi kondisi dimana pemerintah tidak dapat menjangkau secara keseluruhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sehingga perlu adanya pihak yang mengatasi masalah tadi (Budiman, 1988: 112). Menurut Hadiwinata dalam bukunya *Politics of NGOs in Indonesia Developing Democracy and Managing a Movement* (2003) mengatakan bahwa LSM telah menjadi "Sektor Ketiga", yaitu sektor publik yang mengedepankan

kepedulian sosial. Sektor Pertama adalah sektor Negara atau pemerintah yang berkewajiban menjamin pelayanan bagi setiap warga negaranya dan menyediakan kebutuhan sosial dasar, Sedangkan Sektor Kedua adalah sektor swasta (kapitalis) yang terdiri dari kalangan bisnis dan industrial yang bertujuan mencari kehidupan dan menciptakan kekayaan. Sebagai Sektor Ketiga, maka LSM beroperasi diluar pemerintah dan pasar.

Dalam hal ini, LSM KKI Warsi dianggap tepat dijadikan sebagai fokus dalam penelitian ini untuk mengkaji pemberdayaan Orang Rimba. Mengingat sejak tahun 1997 KKI Warsi telah melakukan kegiatan pemberdayaan serta pengembangan kehidupan Orang Rimba di TNBD dan berbagai program konservasi hutan. KKI Warsi yang dalam kegiatannya menghidupkan kembali azas-azas konservasi masyarakat asli dan mendorong pengembangan model pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, LSM ini juga konsisten mendampingi Orang Rimba sejak pengajuan Bukit Duabelas menjadi taman nasional dari tahun 1997 sampai saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil) untuk penanggulangan kemiskinan dengan nama program PKAT (Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil), berkomitmen memampukan KAT dalam berbagai bidang kehidupan, yakni meliputi pembangunan sarana / jalan, sekolah, pemukiman, dan pengembangan sumber daya manusia dalam mempercepat proses pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan. Pemberdayaan KAT bertujuan sebagai proses pembelajaran sosial dengan menghargai inisiatif dan kreativitas KAT terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sehingga KAT secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya. Sehingga adanya perlakuan khusus terhadap pemberdayaan KAT karena berbeda dengan masyarakat umum yang sedikit banyak telah memiliki pengetahuan akan hidup bermasyarakat dan menerima akses publik.

Tesis utama dalam penelitian ini adalah Orang Rimba sebagai salah satu KAT yang ada di Indonesia saat ini mengalami marginalisasi menghadapi ketidakberdayaan tantangan perubahan sosial budaya yang terjadi. Hal ini mengundang berbagai aktor untuk melakukan pemberdayaan melalui pendidikan penyadaran dan advokasi untuk membangun kesadaran kritis mereka, baik menyangkut sosial-budaya dan ekonomi. Salah satu aktor yang penting dalam arena pemberdayaan Orang Rimba adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM yang memiliki fokus pada konservasi hutan dan penyelamatan komunitas adat lokal khususnya Orang Rimba ialah Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi). Sejak tahun 1997, KKI Warsi telah melakukan pemberdayaan guna pengembangan kehidupan Orang Rimba dengan berbagai macam program. Pemberdayaan pendidikan Orang Rimba merupakan satu arena yang penting untuk diteliti lebih lanjut, sebab mereka perlu dibekali pengetahuan untuk menghadapi tekanan perubahan lingkungan yang terjadi akibat modernisasi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut **Bagaimana aktivitas pemberdayaan pendidikan Orang Rimba yang dilakukan KKI Warsi di TNBD ?**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibagi dua : Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan aktivitas pemberdayaan pendidikan Orang Rimba yang dilakukan KKI Warsi di TNBD.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan aktivitas pemberdayaan pendidikan Orang Rimba yang dilakukan KKI Warsi.
2. Mendeskripsikan tanggapan Orang Rimba terhadap pemberdayaan pendidikan yang dilakukan KKI Warsi.
3. Menjelaskan kendala dalam pemberdayaan pendidikan Orang Rimba.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Akademis

Dapat memperkaya referensi tentang Sektor Ketiga dalam hal ini pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat khususnya pada pengembangan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Kemudian penelitian ini menyumbang penggunaan Teori Tindakan Komunikatif oleh Jurgen Habermas untuk menganalisis pemberdayaan pendidikan terhadap Orang Rimba.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi Pemerintah khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Provinsi Jambi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan semua *stakeholder* terkait pemberdayaan Orang Rimba. Juga sebagai bahan masukan bagi pengambilan kebijakan untuk mengevaluasi program pemberdayaan yang sedang dan akan dilakukan terhadap pengembangan komunitas Orang Rimba agar pelaksanaannya dapat lebih baik lagi dan mencapai tujuan yang diharapkan.

